

**GLOBALISASI, KEBIJAKAN PENDIDIKAN, DAN REFORMASI KEBIJAKAN:
KAJIAN LITERATUR**

Andriyanto¹, Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si.²

¹Mahasiswa Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

²Dosen Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang

Alamat e-mail: ¹andriyanto_230680@students.unnes.ac.id,

Alamat e-mail: ²eko.handoyo@mail.unnes.ac.id

ABSTRACT

This critical literature review examines the complex interplay between globalization, education policy, and policy reform in the context of developing countries. Globalization has reshaped the landscape of education policy, transforming it into a space heavily influenced by transnational actors such as the OECD, UNESCO, and the World Bank, as well as neoliberal ideologies promoting efficiency, accountability, and standardization. The study employs a qualitative critical approach based on world-systems theory, policy transfer theory, and critical policy sociology to analyze how global forces affect national education reforms. Findings reveal that education policies are often borrowed from global models without adequate contextual adaptation, resulting in implementation gaps, resistance, and a loss of cultural relevance. While international benchmarks and policy networks drive reform efforts, local realities and values are frequently marginalized. Nonetheless, the review identifies cases of glocalization, where countries adapt global frameworks with local wisdom to maintain educational sovereignty. The study concludes that successful education reform requires a balance between global responsiveness and local rootedness, driven by critical reflection, participatory governance, and social justice values. It calls for increased capacity among policymakers in the Global South to resist passive policy adoption and to engage in transformative policy practices that prioritize equity and contextual relevance.

Keywords: globalization, education policy reform, critical theory

ABSTRAK

Kajian literatur kritis ini mengkaji keterkaitan kompleks antara globalisasi, kebijakan pendidikan, dan reformasi kebijakan dalam konteks negara berkembang. Globalisasi telah membentuk ulang lanskap kebijakan pendidikan menjadi ruang yang sangat dipengaruhi oleh aktor transnasional seperti OECD, UNESCO, dan World Bank, serta ideologi neoliberalisme yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan standarisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis yang berlandaskan teori sistem dunia, teori transfer kebijakan, dan sosiologi kebijakan kritis untuk menganalisis bagaimana kekuatan global memengaruhi reformasi pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan seringkali diadopsi dari model global tanpa adaptasi kontekstual yang memadai,

sehingga menimbulkan kesenjangan pelaksanaan, resistensi, dan kehilangan relevansi budaya. Meskipun tolok ukur internasional dan jaringan kebijakan mendorong reformasi, realitas dan nilai lokal sering terpinggirkan. Namun demikian, kajian menemukan contoh glokalisasi, di mana negara mengadaptasi kerangka global dengan kearifan lokal untuk mempertahankan kedaulatan pendidikan. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi pendidikan yang berhasil memerlukan keseimbangan antara responsivitas global dan akar lokal, didorong oleh refleksi kritis, tata kelola partisipatif, dan nilai keadilan sosial. Kajian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pembuat kebijakan di Selatan Global untuk tidak hanya menjadi pengadopsi pasif kebijakan, tetapi pelaku transformasi kebijakan yang memprioritaskan kesetaraan dan relevansi kontekstual.

Kata Kunci: globalisasi, reformasi kebijakan pendidikan, teori kritis

A. Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, globalisasi telah menjadi kekuatan dominan yang membentuk hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah pendidikan. Arus informasi lintas negara, integrasi ekonomi global, serta kemajuan teknologi komunikasi telah mempercepat penyebaran ide-ide dan model-model pendidikan antarnegara. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak lagi hanya merupakan hasil keputusan nasional yang otonom, tetapi semakin dipengaruhi oleh agenda global, lembaga internasional, dan tekanan pasar global. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana negara dapat mempertahankan kedaulatan kebijakannya dalam sistem

pendidikan di tengah gelombang globalisasi?

Pendidikan tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia terikat oleh konteks sosial, ekonomi, dan politik global yang dinamis. Globalisasi, dalam kerangka World-Systems Theory (Wallerstein), memperlihatkan bagaimana negara-negara pinggiran (developing countries) kerap berada dalam posisi subordinat terhadap negara-negara pusat (core countries) dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan. Ketimpangan struktural ini juga tercermin dalam bagaimana kebijakan pendidikan diformulasikan dan diterapkan, di mana negara-negara berkembang cenderung mengadopsi model yang berasal dari negara maju, baik secara sukarela maupun karena tekanan global.

Seiring dengan itu, muncul berbagai bentuk reformasi kebijakan pendidikan sebagai respons terhadap tuntutan global. Reformasi tersebut sering kali diklaim bertujuan meningkatkan mutu, efisiensi, dan daya saing global, namun tidak jarang mengabaikan konteks sosial-budaya dan nilai-nilai lokal. Kebijakan pendidikan, dalam perspektif Critical Policy Theory (Ball), bukanlah tindakan teknokratis netral, tetapi arena kontestasi kekuasaan dan ideologi. Globalisasi telah menciptakan ruang kebijakan yang diwarnai oleh nilai-nilai neoliberal seperti efisiensi, akuntabilitas, dan kompetisi. Hal ini berdampak langsung pada cara negara-negara merancang kurikulum, sistem penilaian, hingga tata kelola pendidikan.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis hubungan antara globalisasi, kebijakan pendidikan, dan reformasi kebijakan pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk mengurai konsep-konsep utama, menganalisis keterkaitan teoritis dan empiris, serta mengidentifikasi tantangan dan implikasi reformasi kebijakan dalam konteks globalisasi, terutama bagi negara berkembang.

Dengan kerangka teori yang kuat dan refleksi kritis terhadap dinamika global, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana negara dapat menyusun kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap globalisasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur kritis (critical literature review) yang bertumpu pada analisis teoritis, interpretatif, dan reflektif terhadap hubungan antara globalisasi, kebijakan pendidikan, dan reformasi kebijakan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat kompleks, multidimensional, dan sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa global maupun lokal.

Secara epistemologis, pendekatan ini berpijak pada Critical Theory, khususnya pemikiran Jürgen Habermas mengenai tindakan komunikatif dan kepentingan emansipatoris dalam ilmu sosial. Selain itu, pendekatan ini diperkuat dengan kerangka Critical Policy Sociology dari Ball, serta teori transfer kebijakan global (policy transfer) dari

Dolowitz & Marsh. Dengan kerangka tersebut, kebijakan pendidikan dipahami sebagai konstruksi sosial-politik yang terbentuk melalui interaksi antaraktor, diskursus ideologi, dan struktur ekonomi global.

Sumber data kajian ini terdiri dari artikel jurnal akademik bereputasi, buku teori utama, serta dokumen kebijakan dari lembaga internasional (OECD, UNESCO, World Bank) dan nasional (Kemendikbudristek). Literatur dipilih berdasarkan relevansi tematik, kekuatan konseptual, serta kemutakhiran dalam membahas globalisasi dan kebijakan pendidikan. Sebagian besar literatur berasal dari 15 tahun terakhir (2009–2024), dengan tetap mencantumkan karya klasik yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah kombinasi antara analisis tematik (*thematic analysis*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dominan dalam literatur, sementara analisis wacana kritis dipakai untuk mengungkap relasi kuasa dan ideologi dalam narasi kebijakan pendidikan. Integrasi kedua teknik ini memungkinkan kajian mengungkap kedalaman makna serta

bias yang tersembunyi dalam kebijakan global yang diadopsi secara lokal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan budaya, tetapi juga secara signifikan membentuk arah dan isi kebijakan pendidikan. Dalam proses ini, terjadi transformasi paradigma pendidikan nasional menuju model yang berorientasi pada pasar dan efisiensi, di mana prinsip neoliberalisme dan tekanan lembaga internasional memainkan peran sentral.

Globalisasi berperan sebagai kekuatan penentu dalam pembentukan kebijakan pendidikan, dengan OECD, UNESCO, dan World Bank sebagai aktor utama yang memengaruhi model kurikulum, sistem evaluasi, dan tata kelola pendidikan. Melalui instrumen seperti PISA dan standar kompetensi global, negara-negara berkembang terdorong untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan logika global meski belum tentu selaras dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, muncul kecenderungan privatisasi

terselubung dan komodifikasi pendidikan. Sekolah mulai diposisikan sebagai unit usaha yang bersaing dalam pasar pendidikan, sementara guru dan siswa menjadi bagian dari sistem produksi nilai. Akuntabilitas berbasis hasil dan pengukuran kuantitatif menjadi indikator utama keberhasilan, menggeser peran pendidikan sebagai wahana transformasi sosial.

Meski demikian, respons terhadap kebijakan global tidak seragam. Banyak negara melakukan adaptasi kreatif (glocalization) dengan menyelaraskan kebijakan global dengan nilai lokal. Beberapa negara bahkan menunjukkan resistensi selektif terhadap tekanan global. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bersifat deterministik, tetapi merupakan hasil negosiasi antara aktor global dan lokal dalam ruang diskursif yang kompleks.

Dengan menggunakan pendekatan critical policy sociology, kajian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan arena kontestasi wacana dan kepentingan. Reformasi kebijakan yang berhasil bukanlah yang sekadar mengadopsi model global, melainkan yang mampu menyeimbangkan

antara tuntutan global dan realitas lokal, serta berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat pendidikan.

E. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa globalisasi telah secara signifikan memengaruhi arah kebijakan pendidikan di berbagai negara, terutama melalui tekanan ideologis dan normatif yang dibawa oleh lembaga internasional dan wacana neoliberal. Proses globalisasi tersebut mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi kebijakan pendidikan yang sering kali berorientasi pada efisiensi, akuntabilitas, dan daya saing global.

Namun, proses reformasi kebijakan tersebut tidak selalu berhasil mencapai tujuannya karena minimnya adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Banyak kebijakan yang diadopsi dari luar tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem pendidikan nasional, sehingga menimbulkan resistensi dan bahkan distorsi dalam implementasi.

Kajian ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan bukanlah produk netral, melainkan konstruksi sosial

dan politik yang dibentuk melalui relasi kuasa dan wacana dominan. Oleh karena itu, negara-negara, khususnya di Selatan Global, perlu memiliki kapasitas reflektif dan kritis dalam menyaring pengaruh global, serta mampu merancang kebijakan pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. W. (2000). *Education reform and the role of globalization*. In N. C. Burbules & C. A. Torres (Eds.), *Globalization and education: Critical perspectives* (pp. 57–77). Routledge.
- Ball, S. J. (2008). *The education debate*. Bristol: Policy Press.
- Ball, S. J. (2012). *Global education Inc.: New policy networks and the neo-liberal imaginary*. Routledge.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Connell, R. (2007). *Southern theory: The global dynamics of knowledge in social science*. Polity.
- Dolowitz, D., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–24.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Phillips, D., & Ochs, K. (2004). *Educational policy borrowing: Historical perspectives*. Oxford: Symposium Books.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. Routledge.
- Robertson, S. L., & Dale, R. (2009). Globalisation and Europeanisation in education. In R. Cowen & A. M. Kazamias (Eds.), *International handbook of comparative education* (pp. 111–128). Springer.
- Steiner-Khamsi, G. (2012). Understanding policy borrowing and lending: Building comparative policy studies. In G. Steiner-Khamsi & F. Waldow (Eds.), *Policy borrowing and lending in education* (pp. 3–23). Routledge.
- Wallerstein, I. (1974). *The modern world-system*. Academic Press.